

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Salam Siku, *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Rabbani Pers, Jakarta, 2012
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indoensia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017
- Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Andi Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- Arman Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Aristo M.A. Pangaribuan *et al.*, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bernard L. Tanya *et al.*, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. KITA, Surabaya, 2007
- C.Djisman Samosir, *Segenggam Hukum Acara Pidana*, Nuansa Indah, Bandung, 2013

- Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009
- Ermansjah Djaja. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah 019/PUU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegak Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Fockema Andrea, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, teoretis, prkatik, dan masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2011
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang No.31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Jakarta, 2002.
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000
- Muhammad Ikhsan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Buku Panduan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012.

- Pramana, Edisi Lengkap KUHP & KUHP, Yogyakarta, 2012
- Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-undang PSK UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta, 2014.
- Robert K dan Aris Irawan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2019
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sidharta, Bernard Arief, *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Replika Aditama, Jakarta, 2008.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok, 2016
- Sultan Remy Sjahdeini, dkk, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 2018
- Wojo Wasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jogjakarta, 2001.

## **JURNAL, ARTIKEL, DAN KARYA ILMIAH**

- Abdul Ficar Hadjar, *Kendala Dan Tantangan Aparat Penegak Hukum Dalam Konteks Pemberantasan Korupsi, Disampaikan pada Pertemuan Nasional dan Orientasi Dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi*, 18-20 Februari, PBNU-Kemitraan, Jakarta, 2004.

Bambang Ajuno, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Wistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia*, Volume.4 Nomor. 2, Mei 2017

Meiggie P. Barapa, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi*, No.2, *Lex et Societatis*, Vol. I, 2013.

Saristha Natalia Tuage, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, No.2, *Lex Crimen Vol.II*, 2013.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Polri RI, KPK RI, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER 045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

## **WAWANCARA**

Mudazzir M., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sul-Sel

Akhmadi Imam Arifin, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sul-Sel

Andi Irfan Hasan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sel-Sel

## **INTERNET**

Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan Bagi Para Pelapor Haruslah diperluas, [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)1

Jawa Pos, Artikel : Otonomi yang menyebarkan Korupsi, Oleh Lukman Santoso, Peneliti pada STAIDA Institute, peserta program Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta, 27 April 2011